TERKAIT MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Suryo Ndadari Tolak Rekomendasi DPP Apdesi

KR-Hasto Sutadi

Eleman Suryo Ndadari menandatangani deklarasi penolakan rekomendasi DPP Apdesi.

SLEMAN (KR) - Paguyuban Suryo Ndadari sebagai wadah paguyuban seluruh Lurah dan Pamong Kalurahan se-Kabupaten Sleman tetap solid dan fokus pada pelayanan masyarakat dan pembangunan di tengah wacana dan dinamika pemerintahan desa secara nasional.

Menyikapi Rekomendasi Audensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI) Nomor 094/B/DPP-APDESI/X/-2022 yang mengeluarkan 11 rekomendasi, Suryo Ndadari melakukan konsolidasi untuk memperkuat dan menyamakan pemahaman.

"Dari 11 rekomendasi tersebut, poin nomor 4 yaitu masa jabatan Perangkat Desa sama dengan masa jabatan Kepala Desa (Lurah), menjadi salah satu yang wacana yang perlu ditelaah dengan lebih cermat, baik dari aspek yuridis maupun tata kelola pemerintahan," tegas Ketua Suryo Ndadari Sleman Irawan kepada wartawan di Sleman, Senin (31/10).

Didampingi perwakilan elemen Suryo Ndadari lainnya, Irawan menjelaskan, secara kedudukan, tugas dan fungsi, antara Lurah dan Pamong Kalurahan sangat jelas batas perbedaannya. Demikian halnya dengan penetapan masa jabatannya, yang tentu dipertimbangkan untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing. Dan hal tersebut telah dijamin dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

"Suryo Ndadari secara tegas menolak konsep atau wacana masa jabatan Pamong Kalurahan disamakan dengan masa jabatan Lurah. Perlu untuk dikaji ulang dengan cermat. Wacana ini akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," tandas Irawan. **(Has)-d**

Rintisan Kalurahan Budaya Berdampak Ekonomi

SLEMAN (KR) - Dinas Kebudayaan Sleman menginginkan keberadaan kalurahan budaya tidak hanya untuk 'nguri-nguri' budaya saja. Untuk itu Dinas Kebudayaan Sleman terus menyiapkan masing-masing rintisan kalurahan budaya mempunyai dampak ekonomi bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kebudayaan Sleman Edy Winarya mengatakan, tujuan kalurahan budaya ini memang untuk melestarikan budaya yang ada di Sleman. Namun keberadaan kalurahan budaya juga harus mempunyai dampak ekonomi bagi masyarakat yang ada di kalurahan tersebut. "Bukan hanya 'nguri-nguri' budaya saja. Tap juga harus mempunyai dampak secara ekonomi bagi masyarakat," katanya kepada *KR*, Senin (31/10).

Untuk itu sejak menjadi rintisan kalurahan budaya, Dinas Kebudayaan Sleman terus mendorong agar melibatkan UMKM yang ada di wilayah tersebut. Tujuannya supaya keberadaan rintisan kalurahan budaya mempunyai dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Kewenangan kami itu hanya sampai rintisan kalurahan budaya saja. Sedangkan kalurahan budaya sudah menjadi kewenangan DIY. Makanya sejak rintisan kalurahan budaya, kami sudah minta untuk memberdayakan UMKM maupun potensi lainnya agar memiliki dampak ekonomi," terangnya. **(Sni)-d**

PMI Bantul Kunker ke Badung Bali

BANTUL (KR) - PMI Bantul melakukan kunjungan kerja balasan atau studi tiru ke PMI Badung Bali. Kunjungan mulai Jumat hingga Minggu (27-29/10) yang kedatangannya langsung menuju Markas PMI Badung di Jalan Abianbase Mengwi Kapal Badung Bali.

KR-Istimewa.

Kunjungan kerja balasan PMI Bantul ke Badung Bali.

Rombongan dipimpin oleh Dewan Kehormatan PMI Bantul Drs Dwi Daryanto MSi dan Ketua PMI Bantul HM Wirmon Samawi SE MIB diikuti pengurus PMI Kabupaten dan Pengurus PMI dari 17 Kapanewon, Staf UTD dan Markas, TSR dan KSR, serta relawan semuanya 39 personel. Disambut langsung Ketua PMI Badung Kompyang R Suandika SH MH dan sejumlah stafnya.

Ketua PMI Badung mengungkapkan, kegiatan kunjungan kerja balasan ini bisa mempererat persaudaraan dalam bingkai kemanusiaan, silaturahmi dan saling belajar.

Menurutnya, untuk kegiatan operasional PMI Badung sepenuhnya dibantu pemerintah setempat dengan APBD Kabupaten Badung, termasuk pengadaan kantor atau markas serta sarananya. Sehingga di PMI Badung tidak ada kegiatan penggalangan Bulan Dana PMI. Besarnya subsidi dari APBD Kabupaten tahun 2022 sebesar Rp 2,6 miliar.

"PMI Badung berdiri sejak 8 Juli 1962, pertama kali terbentuk di Bali sebelum Kabupaten lain membentuk PMI. Salah satu kegiatan PMI Badung yang menonjol yakni pemetaan wilayah rawan bencana di setiap kapanewon. Satgas PMR dalam setiap Diklat melibatkan Basarnas," ungkapnya.

Sementara anggota Dewan Kehormatan PMI Bantul, Drs Dwi Daryanto MSi, menyampaikan rasa empati dari PMI Bantul terkait dengan terjadinya musibah banjir yang baru saja menimpa warga wilayah Jembrana Bali. Kunjungan PMI Bantul ke PMI Badung juga ingin saling berbagi informasi untuk membesarkan PMI, baik PMI Badung maupun PMI Bantul.

Terkait dana operasional PMI Bantul sangat berbeda dengan PMI Badung. Untuk pendanaan operasional di PMI Bantul setiap tahun melakukan penggalangan dana dengan Bulan Dana PMI yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. **(Jdm)-d**

Target PAD Sektor Wisata Sulit Tercapai

BANTUL (KR) - Kunjungan wisatawan di pengujung tahun 2022 di kawasan Parangtritis dan sekitarnya diprediksi meningkat dibanding sebelumnya. Sementara Pemkab Bantul pasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata tahun mencapai Rp 32 miliar. Merujuk data Dinas Pariwisata Bantul, sampai Oktober 2022 pemasukan sudah menembus Rp 22,8 miliar. "Kita realistis saja, sulit untuk mencapai target sampai akhir tahun ini. Itu sudah kami prediksi sebelumnya. Perhitungan kami diangka Rp 28 miliar," ujar Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo SSos MM, Senin (31/10).

Dengan waktu tersisa dua bulan November dan Desember, cukup berat mengejar kekurangan Rp 9 miliar lebih. Pihaknya tidak menampik kondisi sekarang ini memang jauh lebih baik dibanding 2 tahun terakhir. Namun sektor wisata butuh waktu untuk bangkit sepenuhnya. Artinya sektor wisata saat ini belum pulih seutuhnya.

Tahun depan, target dari Pemkab Bantul masih sama dari sektor wisata yakni Rp 32 miliar. Harapannya melesetnya target tahun ini bisa tertutupi pencapaian tahun yang akan datang. "Karena belum pulih secara utuh sehingga kami pun tidak berani berspekulasi untuk menaikkan target PAD dari sektor wisata," ungkapnya.

Koordinator TPR Parangtritis, Rohmat Riswanto, menjelaskan pergerakan wisatawan tahun ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Rombongan wisatawan dari kalangan pelajar terus berdatangan meskipun belum pulih sepenuhnya. "Sebagai gambaran liburan Satu Sura kemarin tetap lumayan ramai. Tapi tidak bisa full seperti sebelumnya," tuturnya. **(Roy)-d**

BISA DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

Ketua PP Muhammadiyah Resmikan Masjid di Peleman

KR-Judiman

Penandatanganan Prasasti Masjid Husnul Khatimah oleh Haedar Nashir.

BANTUL (KR) - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir MSi meresmikan Masjid Husnul Khatimah Muhammadiyah Ranting Tamantirto Utara, Kasihan Bantul, Senin (31/10). Pembangunan masjid yang berada di Jalan Sunan Kudus Peleman itu menghabiskan dana senilai Rp 10,2 miliar.

Prof Dr Haedar mengemukakan, setelah masjidnya terwujud, bangunannya sudah bagus, harus bisa memakmurkan dan memeliharanya dengan baik, untuk ibadah dan untuk kepentingan atau kamajuan masyarakat.

"Masjid selain untuk ibadah kepada Allah juga boleh dimanfaatkan untuk, pendidikan, kegiatan meningkatkan perekonomian atau kepentingan masyarakat lainnya," ungkap Prof Haedar.

Peresmian masjid ini juga dihadiri mantan Kapolri 2015-2016 Jenderal Polisi (Purn) Baharudin Haiti, Wakapolda DIY Brigjen Pol R Slamet Santosa SH SIK, pengusaha muda Muhammadiyah Fahri Hamzah, Forkompimda Bantul, perwakilan dari PWM DIY, PDM Bantul, PCM terdekat dan undangan lainnya.

Sementara Ketua Pimpinan Aisyiyah Pusat, Dr Siti Noordjanah, yang ditunjuk sebagai koordinator pembangunan Masjid Husnul Khatimah menambahkan, pembangunan Masjid Husnul Khatimah menghabiskan dana sekitar Rp 10,2 miliar, termasuk untuk perluasan lahan.

Dana tersebut, selain dari swadaya masyarakat juga didukung dari para pengusaha muda Muhammadiyah, para tokoh dan simpatisan Muhammadiyah, dari UMY dan donatur dari Jakarta.

Ketua Takmir Masjid Husnul Khatimah, Dr Askuri Ibnu Hamim, menjelaskan masjid ini pertama kali dibangun tahun 1996 menempati tanah wakaf keluarga H Suratijo seluas 400 meter persegi. Seiring dinamika masyarakat di wilayah setempat, dengan kehadiran kampus-kampus, masjid ini semakin kurang memadai untuk memfasilitasi ibadah dan dakwah.

Atas inisiatif keluarga Prof Dr Haedar Nashir, Masjid Husnul Khatimah ini diperluas dan dibangun menjadi masjid yang presentatif. Untuk pelebaran masjid juga membebaskan lahan seluas 960 meter persegi.

"Semua partisipasi ini menjadi amanat bagi kami untuk kemakmuran masjid ini. Bukan hanya sebagai pusat peribadatan tetapi juga sebagai pusat syiar dakwah Islam," pungkasnya. **(Jdm)-d**